

Pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap angka kasus anak putus sekolah di Indonesia

Diky Ramadhan^{1*}, Assita Azka Qatrunnada², Atika Aprilia³, Beny Dwi Lukitoaji⁴

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

¹ dikyrama5@gmail.com * ² askada1004@gmail.com ³ atikaaprilias85@gmail.com ⁴ beny@upy.ac.id

*korespondensi penulis

Kata-kata kunci:

Ekonomi;
Pendidikan;
Kemiskinan;
Ketimpangan;
Putus sekolah.

: ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi ketimpangan yang signifikan antar kelompok masyarakat, terutama dalam hal pendapatan, akses pendidikan, dan kesejahteraan. Ketidaksetaraan ini sering kali menjadi kendala bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan yang ditandai dengan tingginya kasus anak putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat putus sekolah di Indonesia, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat di Indonesia berpengaruh terhadap tingginya kasus anak putus sekolah. Angka anak putus sekolah yang tinggi dipengaruhi oleh gabungan faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pemberian subsidi pendidikan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Keywords:

Economy;
Education;
Poverty;
Inequality;
School Dropout.

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia faces considerable disparities between groups of people, especially in terms of income, access to education, and welfare. These disparities are often an obstacle for the government in achieving sustainable development goals, especially in the field of education, which is characterized by high dropout rates. This study aims to explore in depth the relationship between economic inequality and school dropout rates in Indonesia, as well as uncover factors that strengthen the relationship. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection technique through literature study. The results obtained from this study are that economic inequality between segments of society in Indonesia affects the high dropout rate. The high dropout rate is influenced by a combination of economic, social and structural factors. To address this problem, a comprehensive approach is needed that includes subsidizing education, equitable infrastructure development and raising public awareness of the importance of education.

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Penduduk miskin adalah individu dengan rata-rata pengeluaran per kapitanya per bulan berada di bawah batas Garis Kemiskinan (Prof Il Kemiskinan Di Indonesia, 2024). Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami disparitas yang cukup besar di antara kelompok masyarakat, terutama dalam hal pendapatan, akses pendidikan, dan kesejahteraan. Ketimpangan ini sering menjadi hambatan dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tingginya angka putus sekolah menunjukkan bahwa akses pendidikan masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya memengaruhi kesenjangan pendapatan, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Akibatnya, hal ini menghambat mobilitas sosial dan mengurangi potensi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan antara ketimpangan ekonomi dan pendidikan. (AshariP & Muhammadiyah Kendari mujiati, 2018) mengemukakan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kecenderungan lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Keluarga yang tidak mempunyai penghasilan pasti tidak dapat menjamin kelangsungan pendidikan anak – anaknya. Sebagian dari penduduk ini memang beranggapan bahwa pendidikan penting, namun tercukupinya kebutuhan keluarga jauh lebih penting. Hal ini menimbulkan dampak banyaknya anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, penelitian oleh Fauzyah et al. (2024) menunjukkan bahwa penghasilan orang tua yang sangat rendah dan kurangnya motivasi siswa mengenai pendidikan menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah (Fauzyah et al., n.d.). Wilayah dengan indeks Gini yang tinggi cenderung memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi, yang mencerminkan adanya kaitan kuat antara ketimpangan pendapatan dan terbatasnya akses pendidikan.

Namun, sebagian besar studi tersebut lebih berfokus pada analisis statistik di tingkat makro tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lokal, seperti kebijakan pendidikan daerah atau kebiasaan konsumsi rumah tangga yang berkaitan dengan pendidikan. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan dinamika regional dalam memahami keterkaitan antara ketimpangan ekonomi dan angka putus sekolah. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro untuk mengevaluasi pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan geografis, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam memahami isu tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama berikut, (1) Seberapa besar dampak ketimpangan ekonomi terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia? (2) Faktor-faktor lokal apa saja yang memperparah pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap akses Pendidikan? (3) Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengurangi angka putus sekolah di daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat putus sekolah di Indonesia, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mengurangi angka putus sekolah melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data

secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menggali makna-makna secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi literatur. Studi literatur merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data melalui kegiatan membaca beberapa referensi yang akurat dan relevan atau dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Dari sumber yang diperoleh, didapatkan hasil yang tertera dalam table berikut.

Tabel 1. Presentase Kemiskinan Periode Maret 2021 - September 2024 di Indonesia

Periode	Wilayah
	Pedesaan + Perkotaan
Maret 2021	10,14
September 2021	9,71
Maret 2022	9,54
September 2022	9,57
Maret 2023	9,36
Maret 2024	9,03
September 2024	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan perkembangan persentase kemiskinan di Indonesia dari Maret 2021 hingga September 2024, yang secara keseluruhan mencerminkan tren penurunan. Meskipun tren keseluruhan menunjukkan penurunan, terdapat fluktuasi kecil yang terjadi pada September 2022, di mana persentase kemiskinan meningkat sedikit menjadi 9,57% dari 9,54% pada Maret 2022. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan ekonomi global maupun domestik sementara, seperti inflasi yang memengaruhi harga bahan pokok, sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu, faktor geopolitik global, seperti konflik internasional yang mengganggu rantai pasokan pangan, juga bisa menjadi penyebab kenaikan harga kebutuhan dasar. Fluktuasi kecil ini menunjukkan bahwa meskipun program-program pemerintah terus berjalan, dampak kondisi global dapat memengaruhi kemajuan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Tabel 2. Perkembangan Gini Ratio Periode Maret 2021 - September 2024 di Indonesia

Periode	Wilayah
	Pedesaan + Perkotaan
Maret 2021	0,384
September 2021	0,381
Maret 2022	0,384
September 2022	0,381
Maret 2023	0,388
Maret 2024	0,379
September 2024	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Indeks Gini, dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai distribusi pendapatan suatu negara, di mana nilai yang mendekati 1 mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi (Perdagangan et al., n.d.). Data menunjukkan perkembangan Gini Ratio di Indonesia dari Maret 2021 hingga September 2024, mencakup wilayah pedesaan dan perkotaan. Gini Ratio, sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan, memiliki rentang nilai dari 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Selama periode ini, terlihat adanya fluktuasi dalam Gini Ratio. Pada Maret 2021 dan Maret 2022, Gini Ratio berada di angka 0,384, yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang stabil. Kemudian pada September 2021 dan September 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi 0,381, mengindikasikan perbaikan kecil dalam pemerataan pendapatan dibandingkan periode Maret.

Namun, pada Maret 2023, Gini Ratio kembali meningkat ke angka 0,388, menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Perubahan signifikan terjadi pada Maret 2024, di mana Gini Ratio turun menjadi 0,379, mencerminkan perbaikan terbesar dalam distribusi pendapatan selama periode ini. Akan tetapi, angka tersebut sedikit meningkat kembali pada September 2024 ke 0,381, menunjukkan sedikit penurunan pemerataan dibandingkan Maret 2024, meskipun tetap lebih baik daripada Maret 2023. Secara keseluruhan, Gini Ratio di Indonesia menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan penurunan paling signifikan pada Maret 2024 sebagai angka terendah, meskipun ada sedikit kenaikan kembali pada akhir periode pengamatan.

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi mengacu pada keadaan di mana pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Penyebab ketimpangan ini sangat beragam, termasuk perbedaan pendapatan, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan pelatihan, ketidaksetaraan dalam memperoleh sumber daya, serta ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi (Edelweis Bunga Gunung et al., 2023). Ketimpangan ini terlihat dari distribusi pendapatan yang tidak seimbang, disparitas dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta adanya perbedaan yang mencolok dalam peluang ekonomi (Zai et al., n.d.). Masalah ini sering menjadi fokus utama dalam bidang ekonomi pembangunan, politik, dan sosial, karena dapat berdampak pada stabilitas sosial serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, perbedaan kemampuan untuk mengakses sumber daya, kebijakan ekonomi yang tidak adil, dampak globalisasi, serta kemajuan teknologi dan otomatisasi. Ketika pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, peluang untuk mobilitas ekonomi menjadi terbatas. Selain itu, distribusi tanah, modal, dan peluang investasi yang tidak merata memperburuk situasi. Kebijakan fiskal yang kurang progresif sering memperkuat ketimpangan ini membuat kelompok kaya semakin dominan, sementara kelompok miskin terjebak dalam kemiskinan. Globalisasi juga berkontribusi, di mana hanya individu dengan keterampilan tinggi dan akses teknologi yang dapat bersaing dalam pasar global, meninggalkan kelompok lain tertinggal. Era globalisasi memperburuk ketimpangan pendapatan di Indonesia, terutama akibat pertumbuhan produksi yang tidak merata serta aliran sumber daya internasional seperti investasi portofolio dan investasi asing langsung. Hal ini mencerminkan bahwa negara-negara maju memiliki akses lebih luas terhadap teknologi dan sumber daya yang mendukung peningkatan efisiensi serta produktivitas. Sementara itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun memiliki peluang akses terhadap teknologi modern dan pembangunan, masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan peluang tersebut secara merata (Dwi et al., 2024). Sementara itu, otomatisasi teknologi menggantikan banyak pekerjaan dengan upah rendah, sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki keterampilan terbatas.

Ketimpangan ekonomi membawa dampak signifikan bagi masyarakat, seperti instabilitas sosial, penurunan daya beli domestik, dan hambatan terhadap akses layanan kesehatan serta pendidikan. Ketidakpuasan akibat kesenjangan ini berpotensi memicu konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas negara. Konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil juga mengurangi daya beli mayoritas masyarakat, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini semakin memperburuk masalah kesehatan dan pendidikan, terutama bagi kelompok miskin, sehingga menciptakan kesenjangan yang terus berlanjut antar generasi. Anak-anak dari keluarga miskin sering

kali memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, diperlukan berbagai upaya, seperti meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja, menerapkan kebijakan pajak progresif, memperkuat jaring pengaman sosial, memberdayakan ekonomi lokal, dan mereformasi kebijakan agraria. Pendidikan gratis atau bersubsidi serta program pelatihan keterampilan dapat memberikan kelompok miskin peluang yang lebih baik. Penerapan kebijakan pajak progresif yang membebaskan pajak lebih tinggi pada kelompok kaya penting untuk mendukung redistribusi kekayaan melalui program sosial. Selain itu, subsidi dan bantuan tunai langsung dapat membantu kelompok rentan. Pemberdayaan ekonomi lokal, seperti memperluas akses modal dan teknologi untuk usaha kecil, serta reformasi agraria untuk redistribusi tanah kepada petani kecil, juga diperlukan. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara ekonomi.

Dampak Ketimpangan Ekonomi Terhadap Angka Putus Sekolah

Ada hubungan yang signifikan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat putus sekolah. Ketimpangan ekonomi sering kali secara langsung memengaruhi akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tingkat putus sekolah cenderung lebih tinggi di wilayah dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, akibat terbatasnya akses ke pendidikan berkualitas. Selain itu, minimnya dukungan finansial untuk pendidikan dasar semakin memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan standar internasional hak asasi manusia, hak atas pendidikan dikategorikan sebagai salah satu hak positif yang wajib dijamin oleh negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak ini terlaksana sepenuhnya dan tidak boleh dibatasi (*BAB 1*, n.d.). Walaupun Indonesia telah mengakui pendidikan sebagai hak bagi setiap warga negara, upaya pembangunan selama ini masih cenderung berfokus pada aspek fisik. Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, pemerintah semakin menyadari pentingnya pendidikan dan mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor ini.

Tingginya angka putus sekolah sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi yang membuat anak-anak harus meninggalkan pendidikan demi membantu menambah penghasilan keluarga. Situasi ini lazim terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan tidak tercukupi, pendidikan sering menjadi aspek yang dikorbankan. Kemiskinan struktural menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak untuk bekerja. Keluarga dengan pendapatan terbatas sering kali mengandalkan kontribusi ekonomi dari seluruh anggota rumah tangga, termasuk anak-anak. Anak-anak ini biasanya bekerja di sektor informal, seperti menjadi buruh tani, pekerja rumah tangga, atau bahkan bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti industri. Meski penghasilan yang mereka dapatkan kecil, hal ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan memperburuk masalah ini. Bagi keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup, pendidikan sering dipandang tidak memberikan manfaat langsung dibandingkan kontribusi ekonomi yang dapat diberikan oleh anak-anak mereka. Akibatnya, keputusan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan. Salah satu fakta mengenai maraknya pekerja anak terlihat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 hingga 2019, yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerja anak terlibat dalam sektor informal. Mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) atau bahkan belum menyelesaikan SD. Selain itu, sekitar 50% dari pekerja anak di sektor informal masih aktif bersekolah di jenjang pendidikan formal (Maulana Malik et al., 2024). Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan formal memiliki keterampilan yang terbatas, sehingga di masa dewasa mereka cenderung bekerja di sektor dengan upah rendah dan kesulitan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari perspektif kebijakan, tantangan utama adalah memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Program-program seperti subsidi pendidikan, pemberian beasiswa, dan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin merupakan langkah penting untuk menurunkan angka putus sekolah. Selain itu, penegakan hukum yang

lebih tegas dalam memberantas pekerja anak juga diperlukan agar anak-anak dapat fokus pada pendidikan dan mengembangkan potensi mereka tanpa terbebani oleh tekanan ekonomi.

Angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2022/2023, mencapai 76.834 siswa, dengan mayoritas berasal dari tingkat SD. Meskipun jumlah terbanyak ada di SD, persentase tertinggi tercatat di SMK (0,24%). Siswa laki-laki lebih banyak mengalami putus sekolah dibandingkan perempuan, dengan selisih 15,29%, terutama di jenjang SMK. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara, di mana anak laki-laki lebih rentan mengalami kesulitan akademik dan akhirnya berhenti sekolah. Penyebab utama putus sekolah adalah faktor ekonomi dan pekerja anak, karena anak laki-laki lebih mudah diterima sebagai tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa dari 160 juta pekerja anak di dunia, 97 juta di antaranya adalah laki-laki. Menurut BPS, 76% anak berhenti sekolah karena kendala ekonomi, dengan 67% tidak mampu membayar biaya pendidikan dan 8,7% harus bekerja membantu keluarga. Selain itu, faktor sosial budaya seperti pernikahan dini dan tanggung jawab rumah tangga juga berkontribusi, terutama pada anak perempuan. Peningkatan angka putus sekolah menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Secara keseluruhan, masalah anak yang harus bekerja untuk menopang penghasilan keluarga mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi dan kurangnya perlindungan sosial. Solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta memperkuat kebijakan yang mendukung keluarga berpenghasilan rendah agar anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang tepat, tekanan ekonomi sebagai penyebab putus sekolah dapat diminimalkan, memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Faktor Yang Memperburuk Ketimpangan Ekonomi

Berbagai studi penelitian telah banyak mengidentifikasi berbagai factor yang memperburuk ketimpangan ekonomi khususnya di Indonesia. Di Indonesia, kesenjangan upah menjadi semakin terlihat meskipun pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menekan angka kemiskinan. Namun, data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sering kali belum berhasil menciptakan keseimbangan dalam sistem pengupahan (Indrayani & Muzan, n.d.). Sistem pengupahan yang tidak adil memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Ketidakhadanya regulasi yang memadai dalam pengaturan upah menyebabkan pekerja di sektor tertentu menerima upah rendah, sementara kelompok lain memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Ketidakseimbangan ini semakin memperburuk distribusi pendapatan di masyarakat.

Selain itu, ketidakmerataan akses pendidikan juga menjadi faktor penyebab yang signifikan. Masyarakat di daerah pedesaan sering kali kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya menghalangi mobilitas ekonomi mereka. Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketimpangan sosial dan pendidikan muncul akibat ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam konteks ini, siswa dari keluarga berpendapatan rendah sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak adil, yang menyebabkan mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan (1322-Article Text-6017-2-10-20250110 (1), n.d.).

Globalisasi juga memperburuk ketimpangan ini. Ketidakmampuan kelompok tertentu untuk menguasai teknologi modern menghalangi mereka untuk dapat bersaing di pasar global. Globalisasi dan perkembangan teknologi dapat memperburuk ketimpangan sosial dalam berbagai cara. Pertama, globalisasi membuka pasar internasional yang memberi keuntungan besar bagi individu dengan keterampilan tinggi dan akses teknologi, sementara mereka yang kurang terampil atau tidak memiliki akses terbatas tertinggal. Ini menyebabkan kesenjangan antara yang mampu bersaing di pasar global dan yang tidak dapat mengakses peluang tersebut. Kedua, kemajuan teknologi, seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, menggantikan banyak pekerjaan dengan upah rendah yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok dengan keterampilan terbatas. Ini membatasi peluang kerja bagi mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, akses terhadap teknologi canggih sering kali terbatas pada

negara maju atau kelompok kaya, sementara negara berkembang atau kelompok miskin kesulitan mengakses sumber daya untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital. Akibatnya, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin lebar, karena mereka yang tidak memiliki akses teknologi kesulitan bersaing di pasar global atau memanfaatkan peluang yang tersedia.

Selain itu, dominasi elit politik dan ekonomi lokal sering kali menghasilkan monopoli atas sumber daya ekonomi. Kondisi ini membatasi akses masyarakat terhadap peluang usaha yang adil, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dominasi elit politik dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dengan mengarahkan kebijakan yang lebih menguntungkan mereka atau kelompok tertentu, sementara masyarakat miskin atau terpinggirkan sering kali terabaikan. Elit politik biasanya memiliki kekuatan untuk merancang kebijakan yang mendukung sektor-sektor yang mereka kuasai, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Selain itu, kontrol elit terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan peluang investasi menyebabkan terjadinya monopoli yang membatasi akses masyarakat lainnya untuk berkembang, sehingga memperburuk ketimpangan.

Di sisi lain, dominasi elit politik juga sering disertai dengan praktik korupsi yang mengalihkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan segelintir orang. Hal ini memperburuk ketidakadilan ekonomi dan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Kebijakan yang dihasilkan dari pengaruh elit sering kali mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang semakin mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika generasi muda dari keluarga miskin tidak memiliki akses yang setara untuk pendidikan yang baik, maka mobilitas sosial mereka terhambat, dan ketimpangan ekonomi semakin sulit diatasi.

Faktor Yang Mempertinggi Angka Putus Sekolah

Tingginya angka anak putus sekolah adalah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berhubungan. Berdasarkan berbagai penelitian, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Dari sisi ekonomi, keterbatasan finansial menjadi alasan utama anak-anak harus meninggalkan bangku sekolah. Penelitian dari jurnal *Scientia* (2022) mengungkapkan bahwa keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama selama pandemi COVID-19, mengalami peningkatan jumlah anak putus sekolah (Marsudi et al., 2022). Banyak anak terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini diperkuat oleh temuan lain yang menunjukkan bahwa kemiskinan struktural membatasi akses pendidikan bagi anak-anak, sehingga memperburuk situasi.

Faktor sosial juga memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya angka anak putus sekolah. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah sering kali tidak memberikan dorongan bagi anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi (Yanti & Selinaswati, 2020). Selain itu, tekanan sosial di komunitas tertentu, seperti adanya stigma terhadap pendidikan anak perempuan, semakin memperburuk situasi, membatasi kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan yang layak. Lingkungan bermain yang tidak kondusif menjadi salah satu faktor yang mendorong anak putus sekolah (Widiasanti et al., n.d.). Pergaulan dengan teman-teman yang tidak memiliki semangat belajar sering kali membuat anak kehilangan minat terhadap pendidikan. Dalam beberapa kasus, anak-anak terlibat dalam aktivitas negatif, seperti kenakalan remaja atau bahkan tindak kriminal, yang mengalihkan perhatian mereka dari sekolah. Selain itu, minimnya fasilitas bermain dan belajar yang mendukung di sekitar tempat tinggal mereka membuat anak-anak kesulitan menemukan dorongan untuk mengembangkan potensi secara positif. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi psikologis anak, tetapi juga memperkuat keputusan mereka untuk meninggalkan pendidikan formal.

Angka anak putus sekolah yang tinggi dipengaruhi oleh gabungan faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pemberian subsidi pendidikan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun program ini efektif di beberapa aspek, pelaksanaannya perlu diperkuat, terutama dalam hal distribusi yang lebih adil ke daerah-daerah marginal (Monica & Dompok, 2023). Dalam rangka menurunkan angka putus sekolah di Indonesia, selain kebijakan yang sudah ada, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat dampak kebijakan tersebut dan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Berikut beberapa langkah kebijakan yang bisa diterapkan:

1. Program Pendampingan untuk Keluarga Miskin

Pemerintah dapat meluncurkan program pendampingan untuk keluarga miskin yang memiliki anak berisiko putus sekolah. Program ini bisa memberikan dukungan kepada orang tua agar mereka lebih memahami pentingnya pendidikan, serta bantuan ekonomi untuk mengurangi tekanan finansial yang mendorong anak-anak bekerja. Dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan akses pasar, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan keluarga terhadap anak-anak yang bekerja.

2. Fokus pada Pendidikan Kejuruan dan Vokasi

Bagi sebagian siswa, melanjutkan ke perguruan tinggi mungkin bukan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih banyak membuka program pendidikan kejuruan atau vokasi yang dapat memberikan keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja. Ini juga dapat mengurangi angka putus sekolah karena anak-anak yang merasa pendidikan formal kurang memberi prospek pekerjaan bisa dialihkan ke pendidikan yang lebih sesuai.

3. Penegakan Hukum terhadap Pekerja Anak

Pemerintah juga harus memperkuat upaya pemberantasan pekerja anak dengan penegakan hukum yang lebih tegas. Ini termasuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur serta menyediakan saluran pelaporan yang lebih efektif.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Wilayah Terpencil

Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang berkembang, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas. Program beasiswa dan subsidi pendidikan dapat diperluas, serta meningkatkan pengiriman tenaga pendidik yang lebih terlatih ke daerah tersebut.

Disisi lain, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, ditambah dengan dukungan emosional, merupakan strategi penting untuk meningkatkan motivasi mereka dalam melanjutkan pendidikan (Lidya Nurson & Juwita Sari, 2024). Dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, pemerintah dapat menurunkan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Simpulan

Badan pusat statistik menunjukkan perkembangan persentase kemiskinan di Indonesia dari Maret 2021 hingga September 2024, yang secara keseluruhan mencerminkan tren penurunan. Meskipun tren keseluruhan menunjukkan penurunan, terdapat fluktuasi kecil yang terjadi pada September 2022, di mana persentase kemiskinan meningkat sedikit menjadi 9,57% dari 9,54% pada Maret 2022. Setelah mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat putus sekolah di Indonesia, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memperkuat hubungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi cukup berpengaruh terhadap tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Tingginya angka putus sekolah ini juga diperkuat oleh beberapa faktor diantaranya adalah gabungan faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai

andil yang cukup besar guna mengatasi permasalahan ini. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan adalah program pendampingan keluarga miskin, fokus pada pendidikan vokasi, mempertegas hukum pekerja anak, dan lain sebagainya. Dari beberapa kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Referensi

- AshariP, A., & Muhammadiyah Kendari mujiati, U. (2018). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SISWA PUTUS SEKOLAH MujiatiP 1. In *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* (Vol. 18, Issue 3).
- Dwi, M., Aghil, S., Alazhari, A., Fahrezi, H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. In *Journal of Regional Economics and Development* (Vol. 1, Issue 3). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jred>
- Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin. (2023). Menganalisi Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Fauzyah, S., Yulianti, R., & Andriani, M. (n.d.). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP DI KOTA BANJAR.
- Indrayani, S., & Muzan, A. (n.d.). KESENJANGAN UPAH DAN KEADILAN SOSIAL TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA. *Journal of Islamic Economics*, 07(01), 2025. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Lidya Nurson, N., & Juwita Sari, W. (2024). Program Paket Kesetaraan Upaya Mengatasi Angka Putus Sekolah. *Journal of Global and Multidisciplinary*, 2, 838–844. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Marsudi, M. S., Cholid, N., Zakirman, A. F., & Afiya, W. (2022). UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP KASUS PUTUS SEKOLAH SELAMA PANDEMI COVID 19 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 7(02), 95–106. <https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2706>
- Maulana Malik, M., Oriza Sativa, C., Handayani, M., & Ridho Anugrah, M. (2024). *NoLaJ Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak*. 3, 1–11. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Perdagangan, N., Ekspor, B., & Impor, D. (n.d.). *Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju BERITA RESMI STATISTIK 15 JANUARI 2025 2 Ekspor Impor Profil Kemiskinan Indonesia 2 Gini Ratio*.
- Widiasanti, I., Virgiani Abdul, A., Nirwana, A., Della Arlita, A., & Nopita Sari, L. (n.d.). Ancaman Melawan Putus Sekolah Dengan Dilema Kualitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5228/http>
- Yanti, A. F., & Selinaswati, S. (2020). <title/>. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 237. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1.230>
- Zai, S., Sabailaket, A. S., Manajemen,), & Ekonomi, F. (n.d.). ANALISIS PERAN KEBIJAKAN FISIKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG.